

**KILAS BALIK OPTIMALISASI PENCEGAHAN
BERKEMBANGNYA PAHAM RADIKALISME
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT CIMAHI**

**FLASH OPTIMIZATION PREVENTION FLASH
THE DEVELOPMENT OF RADICALALISM
IN THE CIMAHI RESORT POLICY AREA**

Ruhanda

Staf Pengajar pada Program Studi Program Diploma III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
Ruhanda1993@gmail.com

ABSTRAK

Berkembangnya paham radikalisme di masyarakat merupakan ancaman, sehingga penanganannya harus dilakukan secara sistematis, taktis dan strategis khususnya bagi satuan Binmas di wilayah hukumnya. Kompleksnya permasalahan ini tentu tidak bisa diklaim bahwa berkembangnya paham radikal sudah optimal, karena dalam upaya pencegahan ini bukan hanya tugas kepolisian tetapi terkait dengan instansi-instansi lain terutama dalam menjalin komunikasi dan koordinasi untuk deteksi dini potensi kerawanan dari paham radikal yang bisa saja terus menyebar secara perlahan dan mempengaruhi sikap warga masyarakat yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Personil satuan binmas Polres Cimahi telah melakukan upaya melalui pembinaan dan penyuluhan masyarakat tetapi model pendekatan yang dilakukan belum optimal dilaksanakan, karena pendekatan ini tidak hanya pada kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam tetapi dengan terbatasnya personil lapisan masyarakat tersebut belum tersentuh secara menyeluruh. Dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh bagian yang sangat perlu dukungan dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme, sehingga langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan paham radikalisme. di wilayah hukum polres cimahi dapat diatasi, sehingga peran polri Sehingga diperlukan dukungan yang realistis untuk meningkatkan peran Satuan Binmas Polres Cimahi.

Kata Kunci: Pencegahan, Radikalisme, Peran Kepolisian

ABSTRACT

The development of the understanding of radicalism in the community is a threat, so the handling must be done systematically, tactically and strategically, especially for Binmas units in their jurisdiction. The complexity of this problem certainly cannot be claimed that the development of radical understanding is optimal, because in this prevention effort it is not only the task of the police but is related to other agencies especially in establishing communication and coordination for early detection of potential vulnerabilities from radical understandings that could continue to spread slowly and affect the attitudes of community members who are in conflict with the norms and regulations. Personnel of the Cimahi Regional Police Binmas Unit have made efforts through community coaching and counseling but the approach model adopted has not been optimally implemented, because this approach is not only among religious leaders, community leaders and youth leaders in but with the limited personnel of the society

has not been touched as a whole. In this research based on the data obtained by the part that really needs support in preventing the development of radicalism understanding, so that the anticipatory steps towards the development of radicalism understanding, in the area of cimahi police precincts can be overcome, so that the role of the national police So that realistic support is needed to increase the role of the Cimahi Regional Police Binmas Unit

Keywords: *Prevention, Radicalism, Role of the Police*

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Adanya ketentuan ini untuk lebih menegaskan pembagian tugas dua alat negara yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan negara, yakni TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Kepolisian sebagai alat negara di bidang keamanan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4¹

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan salah satu peran dan tugas Polri yang dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat serta Polri sebagai pilar terdepan dalam melaksanakannya sesuai dengan undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkembangan social budaya di Indonesi justru semakin mengentalkan identitas kesukuan, keagamaan, perbedaan agama menjadi sedemikian dieksploitasi, yang kemudian memberi peluang lahirnya eksklusifisme beragama seperti paham-paham radikal yang berkembang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, sehingga

berdampak kepada terganggunya situasi Kamtibmas yang kondusif.

Perkembangan paham radikalisme di wilayah hukum Polres Cimahi seperti adanya kelompok JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), NII (Negara Islam Indonesia), Al Qiyadah Al Islamiyah, JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) yang menonjolkan sikap-sikap fanatisme terhadap keyakinan dalam memahami kehidupan beragama cenderung berpotensi menjadi sebuah konflik, yang menjadi salah satu ancaman terhadap terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah hukum Polres cimahi Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri, sudah seharusnya mengambil berbagai langkah-langkah atau upaya untuk dapat mencegah agar perkembangan paham radikalisme tidak berkembang yang berpotensi mengakibatkan sebuah konflik di wilayah hukum Polres Cimahi.

Dengan berkembangnya paham radikalisme yang dapat berpotensi konflik tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Polres cimahi yaitu dengan meningkatkan peran Sat Binmas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dengan harapan dapat

¹ Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4

² Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negar Republik Indonesia*

terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Polres Cimahi, maka di dalam penelitian ini dianalisis mengenai Bagaimana mengoptimalkan peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

2. Tinjauan Pustaka

Teori dan konsep yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisa dalam penulisan naskah karya Perorangan (NKP) optimalisasi peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif adalah sebagai berikut:

a. Teori kompetensi

Pada dasarnya baik kompetensi teknis dan prilaku memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan dengan prestasi yang luar biasa. Pengertian kompetensi menurut Spencer adalah karakteristik dasar yang ditampilkan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap yang mana ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh konsep diri, sifat bawaan diri dan motif.³

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diperoleh dan mudah diidentifikasi. Seorang yang mengetahui banyak hal belum

tentu orang tersebut dapat melakukan apa yang dia ketahui.

b. Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan. Keterampilan lebih sukar dari pada pengetahuan.

c. Sikap

Konsep diri merupakan sikap atau nilai individu yang mempunyai sifat reaktif yang dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam waktu singkat.

d. Cirri-ciri

Cirri-ciri adalah karakter bawaan diri, misalnya reaksi yang konsisten terhadap sesuatu.

e. Motif

Motif adalah sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten, yang dapat menghasilkan perbuatan. Kebutuhan keinginan dan perhatian yang biasa terjadi tanpa disadari ini akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mencapai sasaran kerja sehingga pada akhirnya akan berdampak pada prilaku seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, teori kompetensi digunakan untuk menganalisis kompetensi personil Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme.

b. Teori Peran

³ Parulian hutafea, 2008, *kompetensi plus*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 27-30

Peran atau peranan (*role*) adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial misalnya ibu, manajer, guru. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Menurut W.A Friedlander, peran atau peranan yang harus ada dari orang-orang dalam menduduki kedudukannya atau sebagai lembaga sosial adalah sebagai katalisator, mediator, informator, inovator dan fasilitator. Dimana peran tersebut harus ada dalam seorang Pekerja Sosial untuk memulai dan menangani masalah klien. Salah satunya dalam Peran Katalisator, seorang Pekerja Sosial harus siap menerima keluh kesah klien, pada saat klien bercerita tentang masalahnya maka Pekerja Sosial harus mendengarkan masalahnya dengan serius dan penuh seksama.⁴

Berdasarkan uraian di atas, teori peran digunakan untuk menganalisis peranan dari babinkamtibmas sebagai katalisator, mediator, informator, inovator dan fasilitator dalam menghadapi perkembangan paham

radikalisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi.

d. konsep analisis SWOT

Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (2000:18-19), Analisa SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*). Hal ini berarti bahwa pada analisis SWOT harus dianalisis faktor-faktor strategis organisasi dalam kondisi yang ada saat ini.

- a. Kekuatan (*Strength*) adalah situasi internal organisasi berupa kompetensi/kapabilitas/ sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman;
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman;
- c. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan;
- d. Ancaman (*Threat*) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan.⁵

⁴W. A Friedlander. 1998, dalam <http://www.slideshare.net/tantanhermansah/muh-tadi-dan-tantan-hermansah-manajemen-pengembangan-masyarakat-islam>. diakses tanggal 17 juni 2020 , pukul 19.00

⁵Freddy Rangkuti, 2000, *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* jakarta PT gramedia pustaka utama, hal 18-19.

Mendasari teori ini maka dapat dijadikan sebagai pisau analisa didalam merumuskan berbagai factor yang memepengaruhi dalam upaya optimalisasi peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme.

d. Teori Manajemen Strategis

Menurut J. David Hunger dan Thomas L wheelen dalam Rahmat, Manajemen Strategik (2014: 15-30) “*Strategic Management is that set of managerial decision and actions that determines the long-run performance of a corporation*” konsep tersebut dapat diterjemahkan secara bebas bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis pada dasarnya terdapat 4 elemen yaitu ; 1) Pemindaian lingkungan (*enviromental scanning*) yang biasanya menggunakan analisis SWOT; 2) Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*), yang dilakukan dengan menentukan visi, misi, tujuan dan kebijakan serta strategi; 3) Implementasi Strategi (*Strategy Implmentation*), dan 4) Evaluasi dan Kontrol (*Evaluation and Control*).⁶

Mendasari teori diatas maka dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam merumuskan berbagai langkah yang dapat ditempuh dalam merumuskan visi, misi, dan kebijakan serta penyusunan strategi dan upaya yang dapat dilakukan dalam

mengoptimalkan peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme.

3. Metode dan pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada terkait optimalisasi peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam naskah ini adalah dengan pendekatan tugas, pendekatan yuridis, pendekatan empiris, serta pendekatan studi kepustakaan.

4. Pembahasan dan Analisis

Kondisi faktual adalah kondisi saat ini terkait optimalisasi peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Paham radikalismeikalisme yang berada diwilayah hukum Polres Cimahi antara lain : kelompok JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), NII (Negara Islam Indonesia), Al Qiyadah Al Islamiyah dan ISIS (*Islamic State of Iraq and Sham/Daulah Islam Iraq dan Syam*)⁷ yang menonjolkan sikap-sikap fanatisme terhadap keyakinan dalam memahami kehidupan beragama cenderung diimplementasikan melalui cara-cara yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa contoh

⁶ J. David Hunger dan Thomas L Wheelen dalam Rahmat, 2014, *Manajemen strategik* Bandung cv pustaka setia, hal 15-30.

⁷Sumber Data : Intel dasar Polres Cimahi.

kasus kekerasan/kerusuhan akibat paham radikalisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kasus Kerusuhan Akibat Adanya Paham Radikalisme

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1.	2012	1	Kasus Kerusuhan Ahmadiyah
2.	2013	-	-
3.	2014	3	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kasus Pok JAT mendatangi Polsek X dan menutup jalan utama • 1 kasus kerusuhan di kantor Kejaksaan Negeri oleh Pok JAT • 1 kasus penyerangan Masjid
JUMLAH		4	

Sumber data : Intel Dasar Polres Cimahi tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus kerusuhan akibat adanya paham radikalisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Polres Cimahi.

1. Kemampuan sumber daya manusia Sat Binmas Polres Cimahi guna

Susunan Personil Sat Binmas Polres Cimahi

NO	SATUAN	JUMLAH PERSONEL		KET
		DSP	RIIL	
1.	SAT BINMAS	31	25	-6

Sumber: Bagsumda Polres Cimahi Agustus 2019

Dari data tersebut di atas, susunan personil Sat Binmas Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dirasakan masih kurang yaitu baru terpenuhinya 25 personil dari 31 DSP.

b. Kualitas

Kualitas sumber daya manusia bhabinkamtibmans Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

mencegah berkembangnya paham radikalisme

a. **Kuantitas**

Secara kuantitas susunan personel Sat Binmas Polres Cimahi disesuaikan dengan DSP menurut Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang SOTK , dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme adalah sebagai berikut :

1) **Pengetahuan (*knowledge*)**

- a) Personel Sat Binmas Polres Cimahi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada paham radikalisme belum seluruhnya mengikuti dikjur maupun pelatihan-pelatihan
- b) Masih kurangnya pengetahuan personil Sat Binmas Polres Cimahi terkait paham radikalisme.

2) **Keterampilan (*Skill*)**

- a) Masih kurangnya keterampilan personel Sat Binmas Polres Cimahi dalam menjalin hubungan dengan suatu kelompok masyarakat dalam memberikan pembinaan maupun penyuluhan.
 - b) Masih terbatasnya keterampilan personel Sat Binmas Polres Cimahi dalam melakukan komunikasi dengan kelompok masyarakat.
- dan penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Kurangnya pendekatan personil Sat Binmas Polres Cimahi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme.
 - c. Belum adanya langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan paham radikalisme.

3) Perilaku (*attitude*)

Sebagian personil Sat Binmas Polres Cimahi memiliki permasalahan kesehatan atau bermasalah pada kesatuan sebelumnya sehingga motivasi dalam pelaksanaan tugas masih dirasakan kurang baik.

2. Peran Sat Binmas Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme

Peran Sat Binmas dalam menghadapi perkembangan radikalisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi pada umumnya telah dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat namun masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadikan belum optimalnya peran Sat Binmas dalam menghadapi perkembangan radikalisme, yaitu :

- a. Kurangnya koordinasi antara personil Sat Binmas Polres Cimahi dengan instansi terkait dalam mengadakan pembinaan

3. Implikasi

Berbagai kelemahan yang dihadapi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme maka akan berimplikasi kepada hasil yang dicapainya tidak akan maksimal. Oleh karena itu secara medetail impikasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Peran Sat Binmas Polres Cimahi belum sepenuhnya dapat mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Cimahi.
- b. Berpotensi terjadinya konflik di wilayah hukum Polres Cimahi.
- c. Belum optimalnya peran Sat Binmas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Sat Binmas Polres Cimahi Dalam Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme .

Berbagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal

Kekuatan

1. Adanya Komitmen pimpinan Polri untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan personel Polri secara berkelanjutan dengan melakukan perubahan kultur Polri menjadi Polisi yang profesional.
2. Adanya komitmen pimpinan Polres Cimahi untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
3. Kewenangan Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Personil Sat Binmas Polres Cimahi pada umumnya menguasai karakteristik kerawanan daerah di wilayah hukum Polres Cimahi.

Kelemahan

- 1) Personil Sat Binmas Polres Cimahi belum sepenuhnya memahami dan mampu melaksanakan tugas khususnya dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme.
- 2) Kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh personil Sat Binmas dalam mencegah

berkembangnya paham radikalisme kurang efektif.

- 3) Kemampuan personil Sat Binmas dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait masih dirasakan kurang.
- 4) Laporan hasil pelaksanaan tugas hanya bersifat formalitas, belum dilaksanakannya anev setiap selesai pelaksanaan tugas.

2. Faktor eksternal

Peluang

- 1) Masih adanya kepercayaan dan dukungan pemerintah daerah serta masyarakat terhadap Polres Cimahi.
- 2) Sikap kepedulian dan kebutuhan akan rasa aman dari masyarakat.
- 3) Adanya tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang dapat membantu mencegah berkembangnya paham radikalisme.
- 4) adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap kinerja Polres Cimahi

Ancaman

- 1) Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang dapat memahami tentang agama yang dianutnya sehingga mudah untuk dimasuki doktrin-doktrin

radikalisme yang menyimpang dari agama yang dianutnya

- 3) Luasnya wilayah hukum Polres Cimahi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai Polsek-Polsek jajaran Polres Cimahi.
- 4) Perkembangan informasi dan teknologi yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian doktrin-doktrin radikalisme.

Secara deskripsi bahwa kondisi peran Sat Binmas Polres Cimahi dalam menghadapi perkembangan radikalisme seperti yang diuraikan pada Bab III masih dirasakan belum sebagaimana yang diharapkan yang ditandai dengan masih adanya berbagai permasalahan dan persoalan. Dimana hal tersebut turut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, pada bab ini di uraikan kondisi yang diharapkan dari peran Sat Binmas Polres Cimahi dalam menghadapi perkembangan radikalisme, yaitu :

1. Kemampuan sumber daya manusia Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme

b. Kuantitas.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan peran Sat binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme, maka dukungan sumber daya manusia idealnya disesuaikan dengan DSP. Namun selain disesuaikan dengan DSP guna mengoptimalkan peran Sat Binmas, Polres Cimahi dapat memanfaatkan personil Polsek guna membantu

pelaksanaan tugas Sat Binmas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme.

c. Kualitas.

- 1) Pengetahuan (*knowledge*)
 - a) Diharapkan adanya pendidikan dan pelatihan personil Sat Binmas guna peningkatan pengetahuan sehingga peran Sat Binmas Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dapat dilaksanakan secara optimal.
 - b) Meningkatnya pengetahuan personel Sat Binmas Polres Cimahi terkait dengan paham radikalisme.
- 2) Keterampilan (*skill*)
 - a) Meningkatnya keterampilan personel Sat Binmas Polres Cimahi dalam menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat dan dalam memberikan pembinaan maupun penyuluhan.
 - b) Meningkatna keterampilan personel Sat Binmas dalam melakukan

- komunikasi dengan kelompok masyarakat.
- 3) Perilaku (*attitude*)
- Diharapkan dalam penempatan personil pada satuan fungsi yang berada di Polres Cimahi disesuaikan dengan kompetensinya sehingga personil dalam melaksanakan tugas memiliki motivasi yang tinggi.

2.Peran Sat Binmas Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme

Sat Binmas mempunyai peranan yang sangat sentral terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pembinaan masyarakat.⁸ dalam menghadapi perkembangan paham radikalisme. Oleh karena itu, maka kondisi yang diharapkan terkait dengan peran Sat Binmas dalam menghadapi perkembangan radikalisme adalah sebagai berikut :

- d. Adanya koordinasi antara personil Sat Binmas Polres Cimahi dengan instansi terkait dalam mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- e. Adanya pendekatan personil Sat Binmas Polres Cimahi secara berkesinambungan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda

- untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme.
- f. Adanya langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan paham radikalisme dengan dibentuknya suatu peraturan daerah yang mengatur terkait paham radikalisme.

3.Kontribusi

Melalui berbagai pembenahan menyangkut sumber daya manusia serta peran Sat Binmas Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme maka akan berkontribusi kepada hasil yang dicapainya menjadi maksimal. Oleh karena itu secara mendetail kontribusi tersebut diuraikan sebagai berikut :

- g. Dengan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan peran Sat Binmas Polres Cimahi dapat mencegah berkembangnya paham radikalisme.
- h. Terciptanya stabilitas Kamtibmas yang kondusif.

Untuk mendapatkan susunan strategi Berkaitan dengan optimalisasi peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif maka diperlukan sebuah analisis SWOT s pada tabel berikut ini :

⁸ Pasal 51 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres dan Polsek.*

Tabel 4.3
Analisis SWOT

<p align="center">INTERNAL --</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan polri untuk meningkatkan kualitas pers polri. 2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan Polres Cimahi untuk ciptakan kamtibmas. 3. Kewenangan polri sebagai pemelihara kamtibmas. 4. Personil sat binmas pada umumnya menguasai karakteristik kerawanan daerah. 	<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personil sat binmas belum sepenuhnya memahami terkait paham radikalisme. 2. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kurang efektif 3. Kemampuan personil Sat Binmas dalam menjalin kerja dan koordinasi masih kurang 4. Belum dilaksanakan anev setiap selesai dalam melaksanakan tugas.
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan dan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap Polres Cimahi. 2. Sikap kepedulian dan kebutuhan akan adanya rasa aman dari masyarakat. 3. Adanya toga, tomas dan tokoh pemuda yg dapat membantu mencegah berkembangnya paham radikalisme. 4. Adanya control dari masyarakat terhadap kinerja Polres Cimahi. 	<p>STRATEGI SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan kerjasama (S1,2,O1,2,3,4) 	<p>STRATEGI WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel.(W1,2,3,O1)
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 2. Adanya sebagian masyarakat yg kurang dapat memahami agama yg dianutnya. 3. Luasnya wilayah hukum Polres Cimahi. 4. Perkembangan IT yg digunakan sebagai sarana penyampaian doktrin radikalisme. 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan masyarakat.(S3,4,T1,2) 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas anggota.(W3,T3) 2. Anev

, beberapa strategi yang dilakukan a. Jangka pendek (0-6 bulan)
adalah :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan masyarakat.
- 2) Mengadakan kerjasama
- b. Jangka sedang (0-12 bulan)
 - 1) Anev
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas anggota.
- c. Jangka panjang (0-24 bulan)
 - 1) Anev
 - 2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel.

5. Action plan

a. Strategi jangka pendek (0- 6 bulan)

- 1. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan masyarakat.
 - a) Kapolres memerintahkan kepada Kasat Binmas dan Kapolsek untuk membuat rencana pembinaan dan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Cimahi bersama-sama dengan instansi terkait.
 - b) Kapolres memerintahkan kepada Kasat Binmas dan Kapolsek untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan penggalangan kepada seluruh elemen

masyarakat yang berada diwilayah hukum Polres Cimahi bersama-sama dengan kinstansi terkait.

- c) Kapolres memerintahkan kepada Kasat Binmas dan Kapolsek agar membuat laporan dan mengadakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

2. Mengadakan kerjasama

- a) Kapolres bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan paham radikalisme.
- b) Kapolres bersama-sama dengan unsur FKPD menyusun dan mensahkan Peraturan Daerah terkait Paham Radikalisme.
- c) Bersama-sama dengan FKPD mensosialisasikan Peraturan Daerah yang telah dibuat kepada seluruh elemen masyarakat.

b. Strategi jangka menengah (0-12 bulan)

- 1. Adakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi

- jangka pendek, melalui strategi yang sudah berjalan dan memperbaiki implementasi strategi yang belum maksimal.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas anggota.
 - a) Kapolres memerintahkan kepada Kasat Binmas, Kasi Propam dan Kasiwas agar selalu melaksanakan pengawasan terhadap kinerja anggota, sehingga setiap kinerja anggota dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Kapolres menerapkan kebijakan *reward and punishment* secara konsisten dan objektif terhadap seluruh anggota baik yang berprestasi maupun yang melanggar.
- c. Strategi jangka panjang (0-24 bulan)**
1. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap strategi jangka sedang, melanjutkan strategi yang sudah berjalan dan memperbaiki strategi yang belum maksimal.
 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel.
 - a) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk berkoordinasi dalam rangka penambahan personel.
 - b) Kapolres memerintahkan kepada Kasat Binmas untuk melakukan pendataan terhadap personel yang belum mengikuti pendidikan dan kejuruan agar diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan.
 - c) Mengundang pakar komunikasi guna memberikan kursus bidang komunikasi kepada personel Sat Binmas sehingga anggota mempunyai kecakapan yang baik dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan penggalangan kepada masyarakat.

6. Simpulan

- i. Dukungan sumber daya manusia personel Sat Binmas Polres Cimahi masih belum sesuai dengan harapan dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya melalui langkah sistematis dan konseptual dalam pengembangan kompetensi personel tersebut seperti halnya mengikutsertakan personel untuk

mengikuti pendidikan dan kejuruan maupun pelatihan, meningkatkan pembinaan dan penyuluhan, meningkatkan intensitas komunikasi kepada masyarakat sehingga dapat mencegah berkembangnya paham radikalisme di wilayah hukum Polres Cimahi.

- ii. Peran sat binmas Polres Cimahi dalam mencegah berkembangnya Paham radikalisme masih dirasakan belum Optimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya koordinasi antara personil sat binmas Polres Cimahi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan masyarakat, belum adanya pendekatan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh personil Sat Binmas Polres Cimahi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme serta belum adanya langkah-langkah antisipasi terhadap perkembangan paham radikalisme. Sehingga diperlukan peran Sat Binmas Polres Cimahi secara optimal dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dengan harapan kamtibmas yang kondusi dapat terwujud.

7. Saran-saran

- a. Mengusulkan kepada Kapolda up Karo SDM agar dilaksanakan pelatihan secara terpusat di SPN secara rutin bagi personel guna meningkatkan wawasan,

kompetensi dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap paham radikalisme.

- b. Mengusulkan kepada Kapolda mohon kiranya membuat Deklarasi dengan Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Tokoh pemuda untuk menolak berkembangnya paham-paham radikal di wilayah hukum Polda, sehingga dapat dijadikan role model pada tingkat Kabupaten.

Demikian Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan, referensi, waktu dan pengalaman pasis, namun demikian merupakan usaha yang maksimal. Harapan pasis semoga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan langkah-langkah dan kebijakan bagi pimpinan dan rekan-rekan dalam upaya mengoptimalkan peran Sat Binmas Polres Cimahi guna mencegah berkembangnya paham radikalisme dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

8. Daftar Pustaka

Hunger David dan Thomas L Wheelen dalam Rahmat,2014, *Manajemen strategic*, Bandung, cv pustaka setia.

Hutafea Parulian , 2008, *kompetensi plus*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti Freddy, 2000, *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

.....Undang-Undang Dasara 1945

.....Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negar Republik Indonesia*.

.....Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 23 tahun 2010 tentang *susunan organisasi dan tata kerja*

*pada tingkat kepolisian resort dan
kepolisian sektor.*